



**MUKTAMAR  
PKB  
2024**

# **PLATFORM PERJUANGAN POLITIK PKB 2024-2029**

**"Politik Rahmatan Lil 'Alamin -  
PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa"**

**MUKTAMAR PKB 2024  
"PKB SOLUSI BANGSA"**

Bali, 24-25 Agustus 2024

# PLATFORM PERJUANGAN POLITIK PKB 2024-2029

## “Politik Rahmatan Lil ‘Alamin – PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa”

### MUKADIMAH

Pemilu Serentak 2024 menjadi catatan bersejarah bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di ajang Pemilu yang menggabungkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tersebut, PKB mencatatkan empat keberhasilan besar. Pertama PKB berhasil meraih 16.115.665 suara. Jumlah ini terbesar sejak keikutsertaan PKB dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Kedua PKB berhasil meningkatkan kursi DPR RI dari 58 di Pemilu 2019 menjadi 68 di Pemilu 2024. Kenaikan kursi ini juga terjadi di DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga PKB berhasil mengirimkan wakil pertama kali di DPR RI dari 16 daerah pemilihan (Dapil) di antaranya dari Dapil Sumatera Barat II, Sumatera Utara I, Banten I, DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II, Jawa Barat I, Jawa Barat V, Jawa Barat VI, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan NTB I. Keempat PKB berhasil menjalankan amanat Muktamar VI Bali untuk mengantarkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai kontestan Pemilu Presiden 2024. Masuknya Ketua Umum Muhaimin Iskandar terbukti menjadi pengungkit efektif (*coat tail effect*) bagi soliditas pengurus, kader, calon anggota legislatif, untuk bergerak menaikkan suara PKB dalam Pemilu 2024.

Capaian bersejarah ini juga merupakan indikator bahwa **Platform Politik Rahmatan Lil Alamin yang dicetuskan dalam Muktamar tahun 2014 menemukan momentum terbaiknya dan terbukti berhasil diwujudkan dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna oleh PKB. Bahkan, Politik Rahmatan Lil Alamin PKB justru menjadi peredam mengerasnya politik identitas berbasis suku-agama-ras dan antar-golongan (SARA).** Karena itu, capaian terbaik PKB 2024 ini harus ditangkap dan dilanjutkan sebagai peluang besar untuk meneguhkan dan meluaskan perjuangan *Politik Rahmatan Lil Alamin* PKB di masa-masa mendatang. Peneguhan perjuangan politik ini meniscayakan perumusan kembali *platform* politik yang sesuai dengan mandat perjuangan PKB, tuntutan perubahan, dan kebutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu, *platform* politik PKB pada tahun 2024 ini harus semakin bersifat ideologis dan strategis, namun tetap terukur, aplikatif, kontekstual, dan mengatasi seluruh persoalan serta tantangan bangsa Indonesia.

Tantangan Indonesia lima tahun ke depan semakin berat, baik tantangan ekonomi, sosial-politik, maupun perubahan iklim. Di tengah resesi ekonomi global, Indonesia menghadapi persoalan berkurangnya permintaan ekspor, inflasi dan stabilitas harga, meningkatnya angka pengangguran, ketergantungan pada ekspor komoditas, iklim investasi yang tidak kondusif, menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya daya beli, dan lain-lain.

Dalam waktu 5-10 tahun terakhir, demokrasi Indonesia bergeser ke arah oligarki, yang menunjukkan tanda-tanda awal stagnasi dua dekade pasca-reformasi. Indikator utama tren ini meliputi konsentrasi kekuasaan di sekelompok kecil elite yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi; ketimpangan ekonomi dengan sekelompok kecil elite yang mengendalikan sebagian besar sumber daya; kontrol ketat yang membatasi dan menyensor media massa yang kritis terhadap rezim; dan penggunaan aparat militer dan polisi untuk menekan kubu oposisi. Semua kondisi ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung jumlahnya.

Menghadapi tantangan tersebut, *platform Politik Rahmatan Lil Alamin* untuk peduli dan melayani untuk menjadi Solusi Bangsa adalah sangat relevan. Sebab, PKB didirikan bukan atas dasar koalisi kepentingan, sumbangan dana, atau struktur oligarki. Bukan pula untuk memecah belah nasionalisme dan religiusitas atau untuk meraih kemenangan elektoral. Sebaliknya, PKB didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan para ulama yang berdedikasi dengan tujuan yang tulus untuk mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghindari pengaruh oligarki dan kaum oportunistis. Dengan demikian, eksistensi PKB bukan hanya untuk memenangkan pemilu, melainkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik lahir maupun batin dalam kerangka NKRI.

Berangkat dari kondisi paling mutakhir, realitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan bangsa Indonesia pasca-pandemi, pasca-Pemilu 2024 serta pencermatan situasi dan kondisi 5 tahun mendatang, maka pada Mukhtamar 2024 PKB bertekad meneguhkan kembali *platform Politik Rahmatan Lil Alamin* dengan tajuk "**Politik Rahmatan lil Alamin PKB Peduli Melayani Untuk Solusi Bangsa**".

## DASAR TEOLOGIS-SPIRITUAL DAN IDEOLOGIS-FILOSOFIS

Dalam tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah*, prinsip *rahmatan lil alamin* dimaknai sebagai upaya untuk menyemai dan menyebarkan rahmat serta keselamatan bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Dengan demikian, secara sederhana, politik *rahmatan lil alamin* dimaksudkan sebagai politik yang mengedepankan pelayanan total kepada Ibu Pertiwi dengan menjadi solusi bangsa, berpihak pada kepentingan publik dan kehidupan semesta. Meskipun PKB merupakan partai berbasis agama yang lahir dari NU, PKB harus tampil bukan saja untuk kepentingan NU dan Islam, melainkan untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Politik *Rahmatan Lil'alamin* adalah *platform* perjuangan politik PKB yang berlandaskan ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta prinsip dan nilai-nilai

demokrasi yang universal. Bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk itu *platform* politik PKB disusun dengan berlandaskan pada nilai-nilai teologis-spiritual dan ideologis-filosofis yang termaktub dalam *mabda' siyasiy* sebagai nilai dasar perjuangan, asas dan prinsip perjuangan, serta tujuan dan usaha PKB dalam pentas politik nasional.

Dasar *teologis-spiritual* dari *platform* "**Politik Rahmatan lil Alamin PKB Peduli Melayani Untuk Solusi Bangsa**" adalah kesadaran dan keyakinan Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada manusia (Q.S. Ali Imran; 26-27). Kekuasaan itu dititipkan kepada manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi untuk dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dan diabdikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bumi beserta seluruh isinya (Q.S. Al-Baqarah;30), dan (Q.S. Al-An'am;165).

Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. (Q.S. Al-Isra;80). Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. PKB berketetapan bahwa kekuasaan yang hakikatnya adalah amanat itu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan dibatasi periodenya, dan tidak memusat di satu tangan. Dilaksanakan melalui tatanan politik terlembaga yang disepakati bersama, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik. Harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

Dasar ideologis-filosofis dari *platform* Partai Kebangkitan Bangsa "**Politik Rahmatan lil Alamin PKB Peduli Melayani Untuk Solusi Bangsa**" adalah Preamble UUD 1945, Pancasila, dan *maqasidhu-syari'ah* (kemaslahatan rakyat). Konsepsi ideologis-filosofis tersebut terejawantah sebagai berikut:

Politik *rahmatan lil'alam* adalah *platform* PKB untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menciptakan suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial, dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Politik *rahmatan lil'alam* adalah politik yang senantiasa berpijak dan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*).

Politik *rahmatan lil'alam* adalah *platform* PKB untuk senantiasa mewujudkan tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiaparganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Hal ini meliputi: terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). *Platform* politik ini ditempuh dengan pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.

*Platform* Politik *Rahmatan lil'alam* menguatkan dan mengokohkan eksistensi PKB sebagai partai terbuka bercirikan *humanisme-religius (insaniyah diniyah)* dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Karena itu, setiap bentuk dan langkah implementasi Politik *Rahmatan lil'alam* senantiasa mencerminkan usaha dan upaya semaksimal mungkin melayani Ibu Pertiwi untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik, dan mengawal seluruh kebijakan pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya demi sebesar-besarnya kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir-batin seluruh rakyat Indonesia.

## 11 SOLUSI BANGSA PKB

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan usaha di atas dengan berpegang teguh pada *mabda' siyasiy* partai dan prinsip perjuangan, PKB merumuskan platform politik untuk periode 2024-2029 dalam sebuah narasi besar "Politik *Rahmatan lil Alamin – PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa*". Platform tersebut dijabarkan dalam pokok-pokok perjuangan bertajuk 11 Solusi Bangsa yang akan dilaksanakan dan diperjuangkan dalam berbagai kebijakan nasional

### 1. PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN

*PKB akan bekerja sekuat tenaga lahir batin mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.*

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah belum terwujudnya pemerataan pembangunan serta kurangnya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkualitas. Bahkan, setelah perjalanan 26 tahun reformasi, terlihat pemerataan antar daerah di Indonesia masih belum optimal, seperti di wilayah barat dan timur. Begitu juga kesenjangan masih cukup tinggi antara Jawa dan Luar Jawa, di mana Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap PDB (2023). Termasuk dalam hal ini perlunya suatu pembenahan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang harus dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing kawasan.

PKB memandang bahwa pembangunan kewilayahan harus diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial dan ekonomi dengan didukung sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. PKB berpegang teguh pada kaidah fikih yang berbunyi **“tasharruful imam ‘alal ro’iyah manuutun bil mashlahah”** (kebijakan pemimpin atau pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan atau kesejahteraan). Untuk itu, solusinya PKB akan terlibat aktif, bahu membahu dengan semua *stakeholders* agar pemerataan pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia bisa segera terwujud

## 2. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN DESA.

*PKB akan teguh melanjutkan program-program pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan konektivitas antar wilayah serta menjadikan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional.*

Tantangan Indonesia 5-10 tahun ke depan adalah belum optimalnya integrasi ekonomi domestik akibat infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang merata serta infrastruktur konektivitas yang terintegrasi harus menjadi prioritas dan terus dilanjutkan. Dukungan infrastruktur konektivitas yang baik seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api akan mewujudkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses ke pasar regional dan global. Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, dan listrik juga perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah.

Selain itu, salah satu yang harus diperhatikan juga adalah mendorong pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur. PKB secara khusus memandang bahwa pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan peningkatan aksesibilitas wilayah perdesaan (sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, transportasi lokal, dan teknologi informasi) mendesak dituntaskan. Dengan demikian membangun dari desa dan dari bawah bukan hanya jadi jargon semata.

### 3. KEADILAN EKOLOGIS

*PKB akan memprioritaskan konservasi, pelestarian, dan penyelamatan lingkungan menuju Indonesia Net Zero Emissions.*

Krisis ekologi yang terjadi saat ini adalah warisan dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan keadilan antar generasi. Kerusakan lingkungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh berbagai tindakan eksploitatif bermuara pada suatu akibat besar, yakni: KRISIS IKLIM. Krisis iklim telah menimbulkan dampak buruk bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat marginal.

Keadilan ekologis adalah cara kerja dan tujuan baru dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak eksploitatif dan menekankan pada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keadilan ekologis adalah perwujudan dari keadilan distributif dan keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi bermakna bahwa generasi hari ini bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang untuk mendapatkan bumi yang sehat dan layak demi keberlanjutan kehidupan.

PKB bertekad untuk melakukan penataan ulang atas kebijakan, tata kelola, serta politik anggaran dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai pijakan dan prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Kepeloporan setiap kader-kader PKB dalam mengawal kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik *rahmatan lil alamin*.

### 4. IBU, PEREMPUAN, DAN KELUARGA.

*PKB akan berjuang lahir batin dan bekerja sungguh-sungguh untuk memuliakan ibu dan perempuan serta menyejahterakan keluarga.*

Meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa dekade terakhir, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih relatif tinggi. Penyebab utama AKI adalah komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, termasuk perdarahan, infeksi, dan preeklamsia. Akses yang tidak merata ke layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil, berkontribusi pada masalah ini. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan karena stigma sosial, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau kurangnya akses ke layanan perlindungan. Kekerasan seksual, termasuk pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual, masih marak terjadi. Meski telah ada undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual, implementasinya seringkali kurang efektif.

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan keluarga dengan pendapatan rendah. Pernikahan dini seringkali menghentikan pendidikan anak perempuan dan meningkatkan risiko kesehatan, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Perempuan, terutama di daerah terpencil,

seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Hal ini mencakup akses ke layanan kesehatan umum, layanan kesehatan reproduksi dan maternitas. Di banyak daerah, fasilitas kesehatan yang tersedia tidak memadai dalam hal peralatan, obat-obatan, dan tenaga medis yang terlatih, khususnya untuk menangani kasus-kasus terkait kesehatan perempuan.

Meskipun akses pendidikan untuk perempuan telah meningkat, masih ada ketidaksetaraan dalam hal kualitas pendidikan yang diterima, terutama di daerah pedesaan. Anak perempuan seringkali diprioritaskan untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan tinggi. Perempuan seringkali menghadapi kesenjangan upah dan kesempatan kerja dibandingkan laki-laki. Sektor-sektor tertentu, terutama yang didominasi oleh laki-laki, masih sulit dimasuki oleh perempuan. Selain itu, perempuan lebih sering terlibat dalam pekerjaan informal yang kurang terlindungi secara hukum dan ekonomi.

PKB memandang kaum ibu dan perempuan setara sebagai warga negara dan sebagai pelindung keluarga dan masa depan keluarga. PKB bangga telah menjadi bagian aktif dalam pengesahan UU KIA – Kesehatan Ibu dan Anak. Karena itu, PKB bertekad kuat untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada Kaum Ibu dan Perempuan dan anak-anak. Berbagai kebijakan dan program akan dikerjakan dan dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu, kesehatan perempuan dan kesempatan sosial ekonomi Kaum Ibu dan Perempuan.

## 5. PANGAN DAN KEBUTUHAN POKOK.

*Satu dekade menuju kedaulatan pangan dan menciptakan sistem penyediaan kebutuhan pokok murah dan terjangkau.*

Hak atas pangan bagi setiap warga negara dijamin dalam konstitusi kita. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang murah dan terjangkau merupakan tanggung jawab negara. Kebijakan pangan murah dan sehat harus menjadi komitmen politik dari Pemerintah di tengah fluktuasi harga bahan pangan yang terus meningkat, baik disebabkan oleh faktor global maupun faktor dalam negeri.

Kedaulatan pangan menjadi keniscayaan di tengah ancaman krisis pangan global. Dampak dari perubahan iklim serta berbagai krisis politik di global berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan global yang semakin menurun. Gangguan terhadap ketahanan pangan secara global saat ini semakin sulit diprediksi. Sehingga pemenuhan pangan dalam rangka menguatkan cadangan pangan nasional dengan mengandalkan pada impor sangat beresiko. Indonesia harus terus menerus memperkuat produksi pangan dalam negeri, dengan memperkuat rumah tangga petani sebagai basis produksi pangan nasional. PKB mendorong penguatan cadangan pangan nasional melalui penguatan produksi nasional berbasis rumah tangga petani, bukan diserahkan pada mekanisme pasar.

## 6. PEMBERANTASAN KEMISKINAN

*PKB akan berjuang untuk Indonesia dalam satu dekade ke depan mampu memberantas kemiskinan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maju.*

Tujuan pembangunan di Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada target mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga didesak untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan. Apalagi kondisi eksisting menunjukkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, baik secara individu maupun wilayah masih relatif tinggi, walaupun beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan perbaikan. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 dan 2023 angka kemiskinan tercatat masing-masing sebesar 9,54 persen dan 9,36 persen, lalu kembali menurun menjadi 9,03 persen pada Maret 2024.

PKB memandang bahwa masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup serius untuk diselesaikan. Meski angkanya terus menurun, namun kesenjangannya justru semakin melebar. Sehingga diperlukan akselerasi kebijakan yang tepat untuk menjadi solusi dalam pemberantasan kemiskinan ini. Bagi PKB, upaya pemberantasan kemiskinan ini sejalan dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat (*tahqiqul 'adli li ishlahi ar-ra'iyah*).

## 7. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

*PKB akan berkomitmen tanpa batas untuk dalam satu dekade mampu menuju pendidikan dan kesehatan berkualitas yang bebas biaya.*

Capaian pendidikan di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Selama 10 tahun terakhir, rata-rata tingkat lama pendidikan SDM Indonesia masih jalan di tempat, yaitu rata-rata 8 tahun. Sementara SDM negara-negara ASEAN dan OECD sudah di atas 10-12 tahun. Lulusan lembaga pendidikan belum mampu menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi. Hasil PISA (Program for International Student Assessment) tahun PISA 2022 menunjukkan bahwa proporsi peserta didik di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Masih terjadi kesenjangan atau *mismatch* lebih dari 50 persen antara pendidikan dan kebutuhan Industri. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan keterampilan yang mendukung masuk ke dunia kerja, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, dan negosiasi.

Layanan kesehatan di Indonesia masih harus diperbaiki secara luas dan mendasar. *Pertama*, adalah soal akses dan kualitas layanan kesehatan masih minim seperti sekarang. Per tahun 2023, jumlah dokter di Indonesia masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 183,69 ribu berbanding dengan jumlah penduduk 280,73 juta jiwa. Sehingga, rasionya adalah 1 dokter per 1.528 penduduk. Jauh di bawah standar rasio yang ditetapkan WHO, yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. *Kedua*, ketidaksiapan Indonesia melawan Pandemi Covid-19 perlu menjadi pelajaran pahit bagi Indonesia untuk segera memberi prioritas tinggi bagi Bidang Kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Fasilitas kesehatan di daerah-daerah ini seringkali minim, dan tenaga medis yang tersedia juga terbatas, baik

dari segi jumlah maupun kualitas. Kedua, soal angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penyebab utamanya adalah kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan prenatal dan postnatal yang memadai, serta kurangnya pendidikan kesehatan bagi ibu. *Ketiga*, masalah malnutrisi, termasuk kekurangan gizi dan stunting (pertumbuhan terhambat), masih menjadi masalah serius, terutama di kalangan anak-anak di daerah pedesaan dan dari keluarga miskin.

PKB memandang bahwa pendidikan dan kesehatan adalah bidang utama bagaimana sebuah bangsa mewujudkan kesetaraan dan daya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak mungkin Indonesia mampu melompat dan naik kelas menjadi Negara Maju jika status pendidikan dan kesehatannya rendah. PKB akan berjuang sekuat tenaga dalam berbagai level untuk memperkuat dan meningkatkan program dan dukungan negara untuk memajukan bidang pendidikan melalui biaya pendidikan yang gratis hingga 12 tahun. PKB akan mendesak pemerintah membuat kebijakan agar pendidikan tinggi murah dan terjangkau bagi keluarga kelas menengah dan kelompok kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, PKB akan memperjuangkan hak dan tunjangan bagi Nakes- bidan dan dokter dan memperbanyak jumlah dokter dan dokter spesialis.

## 8. RUMAH KERJA INDONESIA

*PKB akan bekerja keras dan bekerja cerdas untuk dalam satu dekade menuju penuntasan Jejaring Rumah Kerja Indonesia.*

Selama 5 tahun terakhir, industri yang berjalan lebih banyak bersifat padat modal ketimbang padat karya. Pemerintah lebih fokus kepada Industri tambang ketimbang manufaktur yang padat karya dan menyerap lapangan kerja. Pascapandemi, meski ada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pengangguran masih relatif tinggi, khususnya di kalangan usia muda. Pada 2022, TPT tercatat sebesar 5,83 persen, sedikit menurun dari 5,86 persen pada 2021. Pasar kerja Indonesia masih ditandai oleh kesenjangan (*mismatch*) antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Ketika pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan pembatasan rekrutmen, sehingga menambah jumlah penganggur. Masih banyak pekerja termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak dilayani dan dibantu oleh sistem jaminan sosial yang ada saat ini, baik jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan.

PKB memandang bahwa lapangan kerja adalah kepentingan nasional. Ekonomi Indonesia hanya bisa maju jika ditopang oleh rata-rata SDM dan pekerja terampil profesional. Karena itu, PKB akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah memprioritaskan program dan proyek pembangunan yang menciptakan lapangan kerja luas. Hanya melalui lapangan kerja lah kelas menengah Indonesia dan mobilitas sosial warga Indonesia dapat dijamin di masa depan. PKB akan mengerahkan segala daya dan upaya di berbagai level untuk menggerakkan peran negara termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk aktif memperbaiki SDM Indonesia. PKB akan berjuang meningkatkan rata-rata pendidikan, memperluas peluang untuk pendidikan tinggi hingga level 30-40 persen dan memperluas kesempatan pekerja untuk memiliki sertifikasi profesional.

## 9. GENERASI MUDA DAN SANTRI

*PKB akan berjuang untuk membentuk generasi muda dan santri mandiri, kompetitif, berbudaya dan sejahtera.*

Lintasan sejarah peradaban mencatat peran pemuda yang senantiasa mengambil peran strategis dalam menentukan kemajuan bangsa. Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, serta berbagai momen-momen besar hingga saat ini menguatkan dan menunjukkan akan peran strategis itu. Namun demikian, kekhawatiran justru datang dari proyeksi masa depan Indonesia. Di tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan, Indonesia akan mengalami onus Demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif memiliki proporsi yang besar. Tanpa penyiapan sumber daya kuat dan kemampuan membangun kapasitas, bonus demografi akan menjadi beban bagi negara.

Di tengah disrupsi di semua lini yang begitu cepat, PKB akan mengambil peran-peran strategis dalam menyiapkan pemuda membangun kapasitasnya menuju Indonesia Emas 2045. Langkah strategis yang akan disiapkan PKB salah satunya dengan menyiapkan para pemuda agar memiliki kemampuan responsif serta adaptif terhadap perubahan sosial pada satu sisi, serta tidak tercerabut dari akar tradisi pada sisi yang lain. PKB ingin menciptakan generasi muda yang mandiri, kompetitif, berbudaya dan sejahtera. PKB akan membangun pemuda yang mampu berkolaborasi, kreatif dan inovatif sehingga melahirkan karya-karya besar bagi bangsanya. Salah satunya dengan menyelenggarakan kredit milenial mandiri untuk santri dan milenial, menyelenggarakan pendidikan dan kewirausahaan teknologi, pendidikan kejuruan di pesantren yang memiliki pendidikan formal, membangun balai-balai budaya untuk pembangunan karakter pemuda, Dana Abadi Pengembangan Olah Raga (DAPOR), serta skill-skill teknis lainnya.

Santri, sebagai bagian tak terpisahkan dengan pemuda, akan mendapat perhatian khusus dari PKB. PKB melihat bahwa sudah saatnya santri harus mampu merespons dan beradaptasi dengan perubahan global yang begitu cepat tanpa tercerabut dari akar tradisi yang dimiliki. Dengan jumlah pesantren sekitar 36 ribu, santri mukim dan tidak mukim sebanyak 18 juta, dan pengajarnya berjumlah 1,5 juta, adalah modal sosial yang sangat besar. Jika mampu dikelola dengan baik, semua ini akan mampu menjadi penggerak kemajuan bangsa.

Karena itu, PKB berkomitmen memajukan santri dan pesantren melalui pembangunan berbagai infrastruktur, fisik dan nonfisik, yang akan mengokohkan pesantren sebagai garda depan dalam pengembangan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin* dan sebagai pusat peradaban Islam Indonesia. Tentu yang pertama adalah mendorong anggaran sebagai konsekuensi Undang-Undang Pesantren. Selain itu, bersama santri dan pesantren, PKB ingin merumuskan kembali peran-peran sosial pesantren agar keberadaannya mampu memberikan sumbangan nyata terhadap masyarakat sekitarnya. PKB akan terus mendorong berdirinya Lembaga-Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didanai oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan **beasiswa pemerintah untuk santri** (LPDP Santri) yang telah diberikan sejak 2018, meneruskan pendirian **Balai-balai Latihan kerja (BLK) di pesantren**, serta mendorong implementasi Perda-perda Pesantren di berbagai daerah.

## 10. TOLERANSI, MINORITAS, DAN DIFABEL.

*PKB akan bersungguh-sungguh menguatkan toleransi dan menegakkan sistem perlindungan minoritas berbasis keadilan serta membangun Indonesia Ramah Difabel.*

Bagi PKB, toleransi adalah hal fundamental dan penting yang memberi penegasan akan komitmen nilai-nilai kebangsaan yang mulai terkoyak dan tercederai. Toleransi juga menjadi penegasan ideologi politik PKB, yakni ideologi Islam *rahmatan lil alamin*. Sebuah konsep yang ingin menunjukkan bahwa Islam hadir untuk memberi jalan terang bagi kemaslahatan umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras dan golongan. Bagi PKB, praktik toleransi menjadi titik pijak penting yang akan memberi penghargaan terhadap pluralitas kebangsaan, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk di dalamnya kelompok difabel.

PKB menyadari bahwa kelompok minoritas di Indonesia adalah kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimana pun punya andil yang besar dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Karena itu, PKB punya komitmen penuh untuk turut bersama-sama kelompok minoritas (dan juga difabel) mewujudkan praktik politik demokratis dan menghadang segala bentuk politik destruktif yang tak pernah memberi penghargaan atas kemajemukan bangsa. Sebagai langkah nyata, PKB akan mengikis praktik-praktik diskriminatif di masyarakat, isu muslim-nonmuslim, isu aliran sesat, isu-isu pribumi-nonpribumi, serta hal-hal lain yang berpotensi merusak kohesivitas sosial dan merobek *khittah* kebangsaan.

Langkah nyata yang akan diwujudkan PKB adalah secara konsisten menegakkan sistem perlindungan minoritas berbasis keadilan serta membangun Indonesia yang ramah difabel. Beberapa hal yang akan diwujudkan antara lain dengan terus melakukan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak minoritas yang terampas, melakukan integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka ketika terjadi persoalan, serta menjamin partisipasi politik kelompok-kelompok minoritas.

Selain itu, sebagai wujud nyata terhadap praktik toleransi, perlindungan minoritas dan difabel, PKB akan membangun Rumah Kerja Difabel dan Sekolah Tinggi Difabilitas, melakukan revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang Difabilitas, memberikan jaminan sosial terintegrasi untuk semua, dan yang paling utama membuat dan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Minoritas.

## 11. KEADILAN DAN ANTIKORUPSI

*PKB akan bekerja keras lahir batin mencapai dan menuju sistem pengelolaan negara berbasis keadilan, bersih dan bebas korupsi, serta berorientasi persatuan.*

Di Indonesia, budaya patronase, di mana hubungan kekeluargaan, persahabatan, atau kedekatan pribadi seringkali lebih dihargai daripada meritokrasi, telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan politik. Dalam sistem ini, individu dengan koneksi pribadi yang kuat cenderung lebih mudah mendapatkan posisi atau kesempatan pendidikan, terlepas dari kualifikasi atau kemampuan mereka. Meski aturan-aturan terkait rekrutmen dan promosi di pemerintahan mengedepankan meritokrasi, dalam praktiknya proses seleksi bisa kurang

transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik. Ini membuka peluang bagi “orang dalam” untuk mendapatkan posisi atau kesempatan tanpa melalui proses yang adil.

Meski konstitusi telah menjamin independensi kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya, pengadilan seringkali mengalami tekanan dari kekuatan politik dan ekonomi. Intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif dapat mempengaruhi keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan politik atau bisnis. Korupsi di lingkungan pengadilan, termasuk suap terhadap hakim, jaksa, atau pejabat pengadilan, masih menjadi masalah serius. Praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap peradilan dan menghambat penegakan hukum yang adil. Warga di daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses layanan peradilan karena keterbatasan infrastruktur, jarak yang jauh dari pusat peradilan, atau minimnya informasi tentang hak-hak hukum mereka. Banyak warga yang tidak mampu membayar biaya hukum dan tidak mengetahui cara mendapatkan bantuan hukum. Ini mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan.

Dalam sistem organisasi birokrasi di pusat dan daerah, penggunaan “orang dalam” dalam pengisian jabatan dan pendidikan di pemerintahan Indonesia adalah hasil dari kombinasi budaya sosial, kelemahan sistem meritokrasi, korupsi, dan faktor-faktor psikologis serta sosial. Pengawasan yang lemah terhadap proses rekrutmen dan promosi di lembaga pemerintahan memungkinkan terjadinya penyimpangan. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, praktik nepotisme cenderung berkembang tanpa banyak hambatan. Orang yang memiliki akses atau relasi dengan pejabat tertentu mungkin mendapatkan posisi atau pendidikan yang lebih baik karena mereka memiliki kemampuan finansial untuk “membayar” jabatan tersebut.

PKB bertekad kuat mengatasi masalah ini, melalui berbagai langkah reformasi di dalam birokrasi dan sistem peradilan secara menyeluruh. Tujuannya, mendorong lembaga menjadi akuntabel dan terbuka. Tujuannya, untuk membuka peluang bagi semua warga yang memiliki bakat dan keahlian. Langkah-langkahnya termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen dan promosi, serta perubahan budaya organisasi yang menekankan pentingnya kompetensi dan meritokrasi. PKB juga akan meningkatkan pengawasan yang lebih kuat dan independen terhadap lembaga-lembaga tersebut untuk mengurangi pengaruh nepotisme dalam sistem peradilan dan birokrasi pemerintahan.

## STRATEGI GERAKAN

Dalam rangka memperjuangkan *platform* di atas, PKB akan mengembangkan strategi gerakan sebagai berikut:

### 1. Penguatan dan Modernisasi Kelembagaan Partai

Organisasi partai yang kuat sangat penting untuk berkembang menjadi partai politik yang modern. Ini termasuk struktur, tata kelola, pengambilan keputusan, administrasi,

manajemen keuangan, dan hubungan kelembagaan. Penguatan aspek-aspek ini sangat penting bagi partai untuk secara efektif memperjuangkan *platform* politiknya sebagaimana digariskan oleh undang-undang.

## **2. Ideologisasi dan Revitalisasi Kaderisasi Politik**

Untuk menjamin regenerasi partai berjalan sesuai dengan sistem meritokrasi, maka kaderisasi secara berjenjang harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu diperlukan desain dan sistem kaderisasi yang sistematis, efektif, dan terukur. Kaderisasi dalam konteks ini adalah sebuah rangkaian proses mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendampingan, pendidikan dan pengembangan kader, hingga promosi dan distribusi kader. Dengan demikian kaderisasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem promosi kader di PKB.

## **3. Pengembangan Kapasitas Pengurus**

Pengurus merupakan komponen penting dalam suatu partai politik, karena merekalah yang akan menjalankan seluruh agenda partai. Untuk itu, agar kepengurusan partai dapat melaksanakan tugas dengan optimal diperlukan pengembangan kapasitas pengurus PKB di semua tingkatan. Kapasitas tersebut setidaknya meliputi tiga hal, yaitu kemampuan mengelola organisasi, kemampuan melakukan komunikasi politik, dan kemampuan mengorganisasi konstituen.

## **4. Relasi PKB-NU**

Hubungan PKB-NU dibingkai dalam norma historis, kultural, dan aspiratif. Kendati demikian, perlu diperjelas dalam rumusan hubungan PKB-NU apakah posisi NU sebagai jamiyah (organisasi) atau jamaah (sesama warga NU). Jika sebagai jamaah maka hubungan PKB-NU merupakan hubungan lahir-batin karena PKB merupakan saluran aspirasi utama warga NU (nahdliyin). Namun dalam konteks jamiyah, PKB dan PBNU merupakan entitas terpisah. PKB merupakan partai politik yang diatur dalam norma Undang-Undang Partai Politik, sedangkan PBNU merupakan Organisasi Masyarakat yang diatur dalam norma Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

PKB dan PBNU tidak mempunyai hubungan struktural, sehingga tidak bisa saling mengintervensi rumah tangga masing-masing. Sifat hubungan PKB dan PBNU secara organisasi bersifat resiprokal yang dinamis. Bahwa dimungkinkan bekerja sama jika saling menguntungkan, pun bisa berada di jalur masing-masing jika tidak ditemukan irisan kepentingan. Hubungan resiprokal ini sama sekali tidak menghilangkan esensi historis bahwa PKB dibentuk struktur NU untuk kepentingan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan reformulasi relasi yang lebih produktif, yaitu dengan membangun sinergi gerakan politik, ekonomi dan gerakan sosio-kultural secara berkelanjutan (simbiosis mutualisme) dan saling menopang.

## 5. Penguatan Fraksi sebagai Kapanjangan Tangan Partai

Dalam kancah politik, fraksi adalah kapanjangan tangan partai politik di ranah legislatif. Dengan demikian, sesungguhnya fraksi merupakan ujung tombak perjuangan partai di ranah parlemen. Agar fraksi dapat memperjuangkan *platform* politik dalam kancah parlemen dengan optimal, penguatan Fraksi PKB di seluruh tingkatan, mulai kabupaten/kota hingga pusat harus dilakukan melalui berbagai strategi, media, dan cara yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

## 6. Peningkatan Kapasitas Legislator PKB

Sebagai ujung tombak perjuangan politik, fraksi memegang peranan strategis. Untuk itu, anggota legislatif yang duduk di fraksi harus memiliki kemampuan dan kapasitas politik yang memadai dalam memperjuangkan *platform* partai dan kepentingan konstituen. Untuk itu, pengembangan kapasitas anggota legislatif adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks ini, kapasitas yang dibutuhkan setidaknya meliputi kemampuan komunikasi politik, kemampuan legislasi, kemampuan penganggaran, dan lain-lain.

## 7. Meluaskan Kerja Sama Politik

Dalam memperjuangkan *platform* politik, tentu PKB tidak bisa sendirian. Hal ini mengingat perolehan kursi PKB di DPR belum sepenuhnya menjadi determinan arah politik nasional secara signifikan. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan partai politik lain dalam memperjuangkan *platform* politiknya, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Kerja sama ini dilakukan hanya dengan partai politik yang memiliki *platform* yang sejalan dan tidak bertentangan secara ideologis.

## 8. Penerapan Strategi *Critical Engagement*

Terlepas berada dalam koalisi pemerintah atau di luar pemerintahan, PKB harus memiliki posisi yang jelas dalam wacana dan praksis politik. Sikap politik PKB tidak harus frontal terhadap penguasa/pemerintah, namun juga tidak melulu bersikap kooperatif dan kompromistis terhadap berbagai kebijakan yang bertentangan dengan *platform* politik partai. Untuk itu, strategi yang dilakukan adalah strategi *critical engagement* (keterlibatan kritis), yaitu mendukung pemerintah sepanjang sesuai dengan *platform* politik dan mengkritisi kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan *platform* politik PKB.

## 9. Penguatan dan Perluasan Jaringan Basis

Berbeda dengan partai politik lain, PKB memiliki basis utama yaitu kaum santri dan warga nahdliyin. Sebagai basis utama, PKB harus memperkuat jaringan pada basis ini. Namun, sebagai partai terbuka, PKB juga harus membuka diri bagi seluruh warga masyarakat dari latar belakang, tradisi, agama, etnis, atau budaya manapun. Untuk itu, PKB harus juga melakukan perluasan basis di komunitas lain di seluruh Indonesia.

## 10. Memperkuat Jaringan Luar Negeri dan Peran Internasional

Politik *Rahmatan Lil'alamin* PKB tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Indonesia, melainkan juga diluaskan pengaruh dan implementasinya ke tingkat dunia. PKB harus terus meluaskan jaringan internasional partai untuk memperkuat eksistensi sekaligus jaringan partai. Keterlibatan PKB dalam forum-forum kerja sama partai lintas negara, organisasi-organisasi partai politik sedunia dan penguatan serta perluasan dewan pengurus PKB di pelbagai negara akan terus dilakukan secara terorganisasi, terus-menerus, dan berkelanjutan.

## 11. Penguatan Advokasi

Sebagai partai politik, PKB tidak bisa lepas dari problematika dan pergulatan hidup dalam masyarakat. Berbagai persoalan rakyat dan pengaduan atas masalah publik meniscayakan PKB terlibat dan mencari jalan keluar. Untuk itu, sebagai komitmen kerakyatan, PKB harus mendampingi, mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, PKB harus memperkuat peran sebagai partai advokasi yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

## PENUTUP

*Platform* “Politik Rahmatan Lil Alamin-PKB Peduli Melayani Untuk Solusi Bangsa” merupakan landasan dan pedoman gerakan politik PKB di seluruh tingkatan dalam melakukan perjuangan politik baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun aksi nyata dalam kehidupan masyarakat.

*Platform* akan dijabarkan dalam dokumen “**Program Perjuangan dan Agenda Kerja-PKB -PPAK-PKB 2024-2025**” yang memerinci Prioritas dan Fokus program kerja selama Jangka waktu 5 tahun kedepan. Perjuangan tersebut harus dilaksanakan dan diperjuangkan dalam berbagai kebijakan nasional dan daerah secara konstitusional.